

BAB II

KIPRAH ULAMA PADA MASA ORDE LAMA

TAHUN 1945 – 1965

A. Kondisi Bangsa Indonesia Pada Masa Orde Lama

Jepang telah menyerbu ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, telah mendarat di Tarakan, Kalimantan timur. Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 12 juni tahun 1942 Komandan Tjarda Van Starckenborgh Stachouwer Belanda di Kalimantan Timur menyerah pada tanggal 12 Januari tahun 1942 kepada Jepang¹.

Jepang menjalankan agresi militer ke berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 24 Januari tahun 1942, pemerintah Jepang berhasil menguasai Balikpapan yang merupakan sumber minyak. Pada tanggal 29 Januari tahun 1942 Pontianak berhasil diduduki atas pemerintahan Jepang. Pada tanggal 3 Februari tahun 1942 pemerintah Jepang berhasil menguasai Samarinda. Sesampai di Kotabangun pada tanggal 5 Februari tahun 1942 tentara jepang melanjutkan penyerbuannya ke lapangan terbang Samarinda II yang dikuasi oleh tentara Hindia Belanda. Dengan direbutnya lapangan Samarinda II terbang maka dengan mudah

¹ Marwati Djoned Posponegoro Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Departemen Pendidikan dan kebudayaan balai Pustaka 1993).p.1

Banjarmasin diduduki oleh Jepang tanggal 10 Februari tahun 1942².

Pemerintah Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Indonesia pada tanggal 8 maret 1942 kembalilah berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Indonesia memasuki periode baru, yaitu priode pendudukan militer Jepang. Berbeda dengan Jaman Hindia Belanda di Indonesia terdapat satu pemerintahan sipil. pada pemerintahan Jepang di Indonesia terdapat tiga pemerintahan militer yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara kedua puluh lima) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi
2. Pemerintahan militer Angkatan Darat (tentara keenam belas) untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta.
3. Pemerintahan militer Angkatan Laut (Armada selatan ke dua) untuk ddaerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku, dengan pusat di Makasar.³

Abad 20 sebagai abad imperialisme, dengan laba tanam paksa, Bandung dijadikan sebagai pusat kereta api yang multi fungsi yaitu: *pertama* sebagai jasa transportasi masa *kedua* dibidang niaga sebagai pengangkut hasil tanam paksa. *Ketiga* dibidang operasi militer sebagai Benteng, seluruh wilayah yang ada perlawanan para ulama dan santri

² Ibid.p. 1

³ Sejarah Nasional Indonesia IV...Ibid p . 7

untuk mempersempit ruang gerak perlawanan ulama dan santri serta memperlemah pengembangan Islam⁴.

Untuk melakukan pertahanan darat, pemerintahan jepang membangun sarana dan prasana pertahanan seperti di daerah Bandung, Sukabumi, dan Lembang dibangun sekolah Militer dan Polisi. Untuk melengkapi pertahanan udara, dibangun pula pusat penerbangannya, Oleh karena itu, perencanaan melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri serta Sultan di seluruh Nusantara.

Pemerintah Belanda menciptakan perang Aceh untuk mematahkan perlawanan Ulama dan Santri serta umat Islam Aceh di bawah pimpinan Teoekoe Tjik Di Tiro, Teoekoe Oemar dan Tjoet Nja Dhien. Untuk Sumatera Utara, diciptakan perang Batak demi melumpuhkan perlawanan Ulama dan Santri yang dipimpin oleh Si Singamaradja XII. Sampai disini terlihat adanya perubahan tatanan politik di Eropa, Timur Tengah, dan India yang berpengaruh besar terhadap perubahan politik di Indonesia. Sangat besar pengaruhnya terhadap perjuangan menegakan nasionalisme yang dipimpin para Ulama dan Santri di Indonesia dalam membendung imperialism Barat⁵.

Para Ulama dihadapkan pada kondisi yang dilematis. pada satu pihak kondisi Timur Tengah berpihak ke Sekutu. Sedangkan propaganda kaisar Hirohito setelah Kesultanan Turki runtuh menjadi republic sekuler Turki atau raja Husein dari Arab

⁴ Ahmad Mansur Surya Negara *API Sejarah 1* (grapindo media pratama 2012).p. xx

⁵ *API Sejarah 2*...Ibid .p. xxii

di ikuti dengan adanya pameran budaya islam dan pembangunan masjid di Tokyo serta mengundang para Ulama dan pimpinan organisasi islam ke Tokyo dengan biaya dari pemerintah Jepang. Di bawah kondisi ini timbul sikap politik ulama yang menerima kehadiran Jepang sebagai saudara tua.

Menyerahnya Belanda. dipropogandakan bala tentara Jepang sebagai berakhirnya pemerintahan Kristen di Indonesia. Para ulama dihadapkan suatu pembaharuan besar diberbagai bidang yang terkait dengan usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Terutama balatentara Jepang mempercayakan pembentukan tentara Pembela Tanah Air Kepada ulama, dalam menghadapi serangan balik Amerika Serikat.

Kesempatan ini dimanfaatkan untuk membangkitkan jiwa keprajuritan para pemuda yang di perjuangkan oleh Oemar Said Tjokroaminoto. Balatentara Jepang tidak hanaya mempercayakan kepemimpinan Tentara Pembela Tanah Air kepada Ulama. P.M Koiso, Pada 7 September 1944, juga menyampaikan janji berkenaan dengan Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari⁶. Janji ini sebagai jawaban terhadap tuntutan kemerdekaan Indonesia berdasarkan Islam yang diperjuangkan oleh K.H Zainal Mustofa dari Pesantren Singaparna, Tasikmalaya serta Kiyai Srengseng dan Hadji Madrias dari Pesantren Indramayu⁷.

Tuntunan K.H Zainal Mustofa dan Janji P.M. Koiso belum terrealisasikan, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan

⁶ *Api Sejarah 2 ... Ibid p. xxvii*

⁷ *Aladin Kato Persatuan Tarbiah Islamiah ... ibid.p. 130*

Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, menjadikan perang dunia ke II dan perang Asia Timur Raya berakhir. Ditandai dengan meyerahnya kaisar Hirohito. Pada slein itu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945⁸,

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno datang ke Bukittinggi pada bulan Mei tahun 1942. K.H Sirajuddin Abbas di jalan Surao Gonjang No.25 persiapan kemerdekaan untuk membicarakan Bangsa Indonesia *pertama*. Pemikiran dan sikap politik bangsa Indonesia *kedua* pemikiran awal Negara Republik Indonesia yang diinginkan⁹. Presiden Soekarno Bersama Wakil Presiden Hatta Merumuskan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 kemudian dibacakan pada 9 Ramadhan 1364, Jumat Legi, 17 agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta¹⁰.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, sehari setelah Proklamasi tepatnya tanggal 10 Ramadhan 1364 Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 para ulama seperti Wahid Hasyim (Nahdatul Ulama) bersama Tengku Mohamad Hasan (Aceh) merumuskan ideologi bangsa dan Negara, pancais dan Konstituasi Undang-Undang Dasar 1945. untuk diserahkan kepada Drs. Mohamad Hatta dan dilanjutkan Kepanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Untuk disahkan.¹¹

⁸ Opcit.p. xxvii

⁹ Opcit.p. 136

¹⁰ *Api Sejarah 2 ...* Opcit.p. xxviii

¹¹ *Ibid ...*p.xxvii

Suatu pemerintahan pusat Republik segera dibentuk di Jakarta pada akhir bulan Agustus tahun 1945. Pemerintah ini menyetujui konstitusi yang telah di rancang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, sebelum menyerahnya Jepang. Akan tetapi angkatan laut Jepang mem bahwa orang-orang Indonesia yang beragama kristiani di wilayahnya tidak menyetujui peranan istimewa Islam. Sehingga Piagam Jakarta dan suatu syarat bahwa kepala Negara haruslah seorang yang beragama Islam tidak jadi dicantumkan. Sukarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1945 Smpai dengan 1967 dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia tahun 1945-1956).¹²

Pada bulan November dan Desember 1945 Revolusi di wilayah pedesaan memasuki suatu tahapan yang dikenal sebagai Revolusi Sosial. Revolusi sosial diakibatkan oleh persaingan antara elit-elit alternatip. Kelompok-kelompok kesukuan dan kemasyarakatan atau generasi –generasi struktur-setruktur kelas sosial adalah kurang penting, kebanyakan revolusi sosial, juga hanya mempunyai arti penting untuk sementara waktu saja kecuali beberapa wilayah Sumatera,.

Di Sumatra dan Jawa mendorong orang-orang yang dengan sepenuh hati mendukung Republik Indonesia untuk melawan sekutu. Atas nama kedaulatan rakyat para pemuda revolusioner mengintimidasi, menculik, dan kadang-kadang

¹² Riklefs *Sejarah Indonesia modern*. Gajah Mada universitas 2011. P. 319

membunuh para pejabat yang dituduh melakukan korupsi, pencatutan, atau penindasan selama pendudukan Jepang¹³. Para anggota salah satu santri abangan sering mengulingkan pemerintahan sekutu, atas nama kedaulatan rakyat.

Peristiwa medium merupakan salah satu titik balik revolusi yang sangat penting. Partai Komunis Indonesia PKI tidak akan lagi merupakan ancaman bagi para pemimpin Republik Indonesia, yang berkuasa sampai tahun 1950-an. Golongan kiri pada umumnya tidak dipercaya lagi dan banyak pemimpinnya yang telah dijebloskan kepenjara atau mati.

Dengan berakhirnya kelompok Stanilis maka kaum komunis nasional yang menganut pemikiran Tan Malaka dan menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di medium, bergabung membentuk Partai Murba pada bulan Oktober tahun 1948. Mereka kini merupakan kelompok kiri yang utama di kalangan kaum revolusioner. Peristiwa Madiun menciptakan tradisi permusuhan antara Partai Komunis Indonesia PKI dan memperbesar pertentangan antara Masyumi dan PKI seperti juga halnya dengan ketegangan kemasyarakatan santri-abangan. Persekutuan antara perwira militer dan pemerintah Republik Indonesia menjadi semakin kuat. Pihak militer sendiri lebih ditempa dalam pertempuran dan bersatu¹⁴.

Keberhasilan Republik Indonesia menumpaskan pemberontakan kaum komunis mengubah simpatik Amerika yang

¹³ Ibid...p. 328

¹⁴ Ibid...p. 346

didasarkan atas sentiment-senmtimen anti penjajah, menjadi dukungan diplomatic yang didasarkan pada strategi global¹⁵.

Republik Indonesia telah menunjukkan anti komunis oleh karna mendapat dukungan dari Amerika. Ketika terakhir kalinya melaksanakan untuk malakukan penaklukan, maka Amerika Serikat memberikan dukungan diplomatik mereka kepada pihak Republik Indonesia¹⁶.

Belanda secara sepihak melanjutkan dengan penyelesaian federal mereka, perundingan-perundingan antara Belanda dengan pihak Republik Indonesia terhenti sama sekali. Wakil Presiden Hatta tidak bersedia mengabulkan permintaan pihak Belanda agar mereka bertanggung jawab atas keamanan di dalam Negara selama peralihan kemerdekaan.

Pada tanggal 18 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisional yang kedua dan merupakan bencana militer politik bagi Indonesia, walaupun pada saat itu tampaknya Indonesia memperoleh kemenangan. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948 Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Para pemimpin Republik Indonesia membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan opini dunia akan begitu tersinggung sehingga kemenagan militer Belanda akan berbalik menjadi kekalahan diplomatik. Setelah ditangkapnya Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta, Agus

¹⁵ Ibid...p.346

¹⁶ Ibid...p.347

Salim, (Mentri Luar Negeri) dan seluruh kabinet terkecuali yang tidak ada di tempat¹⁷.

Dewan keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa PBB merasa tersinggung sekali, sesuatu yang memang diharapkan diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia komite Perserikatan Bangsa Bangsa PBB sedang berada dikaliurang yang letaknya tidak jauh hanya beberapa kilometer dari Yogyakarta ketika Belanda menyerang, demikian martabat, wewenng, serta jasa-jasa baik Perserikatan Bangsa Bangsa PBB tampaknya telah diperlakukan secara tidak pantas oleh Belanda. Pada tanggal 22 Desember tahun 1948 Amerika Serikat menghentikan pemberian dan bantuan terhadap Belanda. Supaya keluar dari Indoneisia Belanda meneriama himbawan Perserikatan Bangsa Bangsa PBB supaya mengadakan gencatan senjata pada tanggal 31 Desember tahun 1948 supaya di Jawa dan tanggal 5 Januari tahun 1949 di Sumatera.

Pada tanggal 6 Juni Tahun 1946 pemerintah Republic Indonesia kembali ke Yogyakarta yang sudah di tinggalkan oleh Belanda pada akhir bulan Juni 1949. Pada saat peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan yang keliam pada tanggal 17 agustus 1950 semua struktur konstituante semasa tahun-tahun Republik Indonesia secara resmi dihapuskan.

Pada tanggal 21 Februari Tahun 1957 Presiden Soekarno mengusulkan demokrasi terpimpin yang merupakan suatu bentuk

¹⁷ Ibid ...p.347

pemerintahan yang lebih cocok dengan kepribadian nasional. Pemerintah itu akan didasarkan pada kabinet gotong royong yang terdiri dari partai-partai besar termasuk PKI, yang dapat nasihat-nasihat dari Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional pemuda, kaum buruh kaum tani, kelompok agama kelompok daerah dan lain-lain bukannya partai partai politik akantapi tidak menghapuskan parlemen. Gagasan tentang kabinet Hatta. Satu-satunya langkah yang akan meredakan –gerakan protes daerah, nyat-ntyata tidak terpikirkan oleh sukarno, PNI, PSI, dan partai-partai lain yang tidak mendukung.

Meskipun sistem politik sampai tahun 1957 mempunyai kelemahan-kelemahan, namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan. Negara Indonesia merupakan sebuah Negara tunggal tidak pernah mudah untuk mengetahui bagaimana komitmen-komitmen massa seperti itu tumbuh tetapi beberapa unsur telah menimbulkan suatu identitas yang benar-benar Indonesi, tersebarny bahasa Indonesia. Pendisketritan identitas-identitas politik kedaeraah atu kesukaan pederallisme Belanda¹⁸.

Sikap lanjut para ulama, mendukung dan menyambut maklomat Wakil Presiden tanggal 3 november tahun 1945 dengan mendeklarasiakan berdirinya partai islam Indonesia masyumi tanggal 7 November tahun 1945, disertai dengan pernyataan, 60 miliar kaum muslimin Indonesia siap berjihad fi sabilillah

¹⁸ Ibid...p. 386

melawan penjajah. Perang dijalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajah. Disertai pula keputusan pembentukan barisan sabilillah dan hizbullah dinyatakan sebagai barisan istimewa Tentara Keamanan Rakyat TKR.

Loyalitas ulama dengan partai dan laskarnya terhadap pemerintah yang dipimpin oleh presiden Sukarno dan oleh wakil presiden Mohamad Hatta. Bertentang dengan kelompok sosial dan komunis yang pernah kerja sama dengan sekutu pada masa pendudukan bala tentara Jepang, dengan lascar pemuda sosial Indonesia, Pesindo, Mereka berupaya melancarkan kudeta, mematahkan peran ulama dalam pemerintahan dan militer.

1. Dilakukan oleh kelompok sosial sultan syahrir, melakukan kudeta tak berdarah 16 Oktober 1945. Membatalkan seluruh keputusan komite nasional Indonesia Pusat. KNIP. 22 Agustus 1945. Mengeser dan menggantikan pimpinan nasional yang pernah kerja sama dengan pemerintah bala tentara jepang kecuali peresiden dan wakil presiden.
2. PKI dibawah Muhamad Yusup dengan menggunakan lascar persindo melancarkan kudeta di Cirebon 12 Februari 1946 dengan pertimbangan rusia di bawah stalin sebagai kelompok Sekutu dalam perang Dunia II, setelah perang Dunia II berakhir, Belanda merasa berhak menerima kembali daerah jajahannya. PKI sebagai anggota komintern berpihak kepada sekutu, bersikap tidak

membenarkan proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka tanpa belanda.

3. Kelompok komunis nasional di bawah pimpinan datuk tan malaka, melancarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipimpin oleh sultan syahrir, 3 Juli 1946, menuntut testamen politik bahwa presiden dan wakil presiden pernah berjanji akan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Tan Malaka¹⁹.
4. PKI di bawah pimpinan Amir Sarifuddin dan musa, didukung oleh presindo dan front Demokrasi Rakyat FDR, melancarkan kudeta PKI di Madiun, 19 September 1948 berupaya menumbangkan kabinet Hatta, Dengan adanya kudeta PKI di Madiun, presiden sukarno menyatakan PKI sebagai teroris²⁰.

Sultan dari sekitar 40an kesultanan seluruh Indonesia, menyerahkan kedaulatan kepada pimpinan nasional, Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, 1 September 1946, dalam maa perang Kemerdekaan, 1945-1950, para ulama selalu mendukung perjuangan melalui diplomasi: lingkajarjati, Renvile, KMB dan perjuangan grilia yang dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Tidak pernah terlintas berupa menggunakan kekuatan militer dan Iskandar serta massa parpolnya untuk melakukan kudeta.

¹⁹ Ahmad Mansur Suryanegara *API 2 SEJARAH*. Salamadani Bandung 2012.p.xxviii

²⁰ Opcit.p.xxxi

Loyalitas Ulama dan Parpol Masyumi terhadap Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, Ditampilkan oleh Mohamad Natsir dengan gagasan Mosi integral, mengakhiri masa Republik Indonesia Serikat RIS, dan Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada tanggal 1 Agustus 1950. Mohamad Natsir berasal dari Persatuan Islam Persis, Jong Islamiten Bond JIB, Partai Islam Indonesia PMII, dan Masyumi, Meletakkan dasar pemikiran kesatuan bangsa dan Negara.

Suatu perestasi pemikiran politik yang cemerlang di tengah terpecah belahnya Negara dalam beberapa Negara bagian yang berasal dari Negara boneka penjajah Belanda, Bahkan, Negara republic Indonesia berada dibawah republic Indonesia Serikat RIS, kemudian muhamad natsir mengajak para pemberontak bersenjata yang bertujuan kudeta, seperti APRI, KNIL Andi Azis, RMS, serta NII untuk sama-sama membubarkan diri, dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI. Dengan sukarno sebagai Presiden dan Mohamad Hatta Sebagai Wakil Presiden, berkat konsep pemikiran dan disambut baik oleh segenap Negara bagian dan Republik Indonesia. Menjadikan Mohamad Natsir sebagai perdana menteri.

Setelah perang Dunia II berakhir dan melahirkan Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur atau Blok Demokrasi dan Komunis, Perang kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950,

melahirkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan Kompretasi Indonesia-Malaysia. Kelanjutan dari konsep demokrasi terpimpin, menjadikan PKI yang pada awalnya dicap sebagai teroris oleh presiden Soekarno saat terjadinya kudeta PKI di medium, mendapat kesempatan menduduki Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan Front Nasional yang pernah didirikan pada masa Kudeta PKI di Madium²¹.

Kondisi ini PKI melancarkan Kudeta G 30 S, 30 September 1965 di Jakarta, Dampaknya, Partai Politik dinilai tidak mampu menciptakan kesatuan bangsa di bawah Orde Baru, Tahun 1965-1997. Presiden Soeharto mengendalikan Partai Politik menjadi Dua: Partai Persatuan Pembangunan-PPP dan Partai Demokrasi Indonesia-PDI, Sebelum adanya kebijakan Parpol itu. Didahului dengan adanya demonstrasi. KAMI dan KAPPI yang mayoritas aktivisnya berasal dari HMI, PMII, IMM, SEMMI, dan Demokrasi terpimpin tahun 1959-1965. Semua organisasi ini merupakan keorganisasian Santri di universitas, institut, dan sekolah.

Orde Baru yang memberikan kesempatan bagi kalangan militer memimpin Negara, kembali ke UUD 1945 dan Pancasila, tidak dapat berlanjut lebih lama lagi. Pakopkantip dan Laksus membuat kebijakan yang menjauhi Ulama dan Umat Islam. Terjadinya banyak pelanggaran kemudian dikoreksi kelompok petisi 50 yang dipimpin oleh Ali Sadikin dan Mohamad Natsir,

²¹ Ibid...p.xxxi

NAMun Masih mampu bertahan lama. Baru setelah rusia terjadi gerakan pembaharuan atatu perestronikan dan demokrisasi. Pada tahun 1987 menularke Indonesia. Tahun 1997, pemerintah Orde Baru dadpat di lengserkan, Amin Rais ketua pusat muhamadiyah menjadi tokoh gerakan Utama gerkan pembaharuan dan menghidupkan kembali Demokrasi serta Partai Politik.

Dampak dari Orde Reformasi, muncul partai-partai politik seperti jamur tersiram hujan, Ulama santri dan umat islam dihadapkan pilihan pimpinan partai politik yang tidak satu lagi baik dari pimpinan sipil dan militer yang berlatarbelakangan darikeluarga muslim. Rakyat dan umat islam mulai melihat banyak pemimpin yang menampakan wajahnya.

B. Peranan Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Pendidikan dan Keagamaan

Indonesia adalah Negara dengan jumlah umat islam terbesar oleh karena itu hubungan Indonesia dengan agama sangatlah erat kaitannya, di kebanyakan Pendidikan agama pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Pendidikan yang diterapkan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, awal dan pasca kemerdekaan, hingga masuknya Orde Baru terkesan menganak tirikan

pendidikan Islam karena sebuah alasan “Indonesia bukan negara Islam”. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh Ulama-Ulama Islam.

Pendidikan Islam sudah mulai dikenal sejak kedatangan Islam ke Indonesia. Pendidikan Islam memakai sistem sorogan atau perorangan dan berlangsung secara sangat sederhana serta tidak mengenal strata atau tingkatan seperti pendidikan pesantren, dan kemudian berkembang dengan sistem kelas dalam pendidikan modern,²²

Penyelenggaraan pendidikan agama pasca kemerdekaan Republik Indonesia mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga pemerintahan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tahun 27 Desember 1945 menyebutkan:

Madrasah dan pesantren pada hakikatnya adalah suatu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat, berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah²³.

Indonesia baru memproklamakan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah

²² Abdurahman Wahid *Kitab Kuning pesantren dan tarekat*. IKAPI Bandung .p.18

²³ Fuad Fahrudin. *Agama dan Pendidikan demokrasi* Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Jakarta 2016.p.3

berbenah terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital. Dan untuk itu dibentuklah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Kementerian PP dan K pada saat itu mengeluarkan instruksi umum yang isinya memerintahkan kepada para kepala sekolah dan guru-guru, yaitu:

1. Mengibarkan bendera merah-putih setiap hari di halaman sekolah.
2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang.
4. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala ucapan dan istilah yang berasal dari pemerintah Jepang.
5. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.

Selain dari kebijakan-kebijakan tersebut, tindakan selanjutnya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pada masa Orde Lama ada beberapa peristiwa dalam bidang pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu:

- a. Dari tahun 1945-1950 landasan pendidikan adalah UUD 1945 dan falsafah Pancasila.
- b. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di bagian Timur Indonesia menganut sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman pemerintahan Belanda.
- c. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menetapkan manifesto politik Republik Indonesia menjadi haluan negara. Di bidang pendidikan ditetapkan Sapta Usaha Tama dan Panca Wardana.

Di tengah-tengah revolusi fisik, pemerintah Republik Indonesia tetap membina pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Adapun pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Agama.

Pendidikan agama Islam untuk umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. sebelum itu pendidikan agama sebagai ganti pendidikan budi pekerti yang

sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada bulan Desember tahun 1946 dikeluarkanlah peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama dimulai pada kelas IV SR (Sekolah Rakyat) sampai kelas VI. Pada masa itu keadaan keamanan Indonesia belum mantap, sehingga SKB dua menteri tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama sejak kelas I SR (Sekolah Rakyat). Pemerintah Republik Indonesia membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen P dan K dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya adalah ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum.

Pada tahun 1950 di mana kedaulatan Republik Indonesia telah pulih untuk seluruh Indonesia, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari panitia itu adalah munculnya SKB yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951, Nomor: 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan),

Nomor K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama), yang isinya adalah:

Pendidikan agama mulai diberikan di kelas IV Sekolah Rakyat Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka pendidikan agama mulai diberikan pada kelas I SR (Sekolah Rakyat), dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya dimulai pada kelas IV SR (Sekolah Rakyat).

Pendidikan agama diberikan pada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua atau wali. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama. Untuk menyempurnakan kurikulum Pendidikan Agama dibentuk panitia yang dipimpin oleh KH. Imam Zarkasyi dari Pindok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952.

Dalam sidang pleno MPRS, pada bulan Desember 1960 diputuskan sebagai berikut: “Melaksanakan Manipol Usdek di bidang mental, agama, dan kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk budaya asing.

Pada tahun 1966, MPRS melakukan sidang, suasana pada waktu itu adalah membersihkan sisa-sisa mental G-30 S/ PKI. Dalam keputusannya di bidang pendidikan agama telah

mengalami kemajuan yaitu dengan menghilangkan kalimat terakhir dari keputusan yang terdahulu. sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib para siswa mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia²⁴.

Lahirnya beberapa organisasi Islam di Indonesia lebih banyak karena didorong oleh para ulama dikarenakan mulai tumbuhnya sikap patriotisme dan rasa nasionalisme serta sebagai respon terhadap kepincangan-kepincangan yang ada di kalangan masyarakat Indonesia pada akhir abad ke-19 yang mengalami kemunduran total sebagai akibat eksploitasi politik pemerintah Belanda. Langkah pertama diwujudkan dengan kesadaran berorganisasi.

Pergolakan rakyat Indonesia melalui bidang pendidikan, makin menumbuhkan kesadaran para ulama dan tokoh organisasi Islam untuk melawan penjajah Belanda. Dengan sendirinya, kesadaran berorganisasi yang dijiwai oleh semangat keislaman dan rasa nasionalisme yang tinggi menimbulkan perkembangan era baru di lapangan pendidikan dan pengajaran. Dan lahirlah perguruan-perguruan nasional yang ditopang oleh usaha-usaha swasta (partikelir menurut istilah pada waktu itu) yang berkembang pesat sejak awal tahun 1900-an, sekolah-sekolah tersebut yaitu: Sesuai dengan haluan politik, seperti Taman Siswa, yang mula-mula didirikan di Yodyakarta. Sekolah Sarikat

²⁴ Ricklefs *Sejarah Indonesia Modern*. ...Ibid.p.428

Rakyat di Semarang, yang berhaluan komunis. Ksatria Institut, yang didirikan oleh Douwes Dekker (Dr. Setiabudi) di Bandung.

Selain itu juga muncul Perguruan-perguruan yang didirikan oleh para uama pada Sekolah Rakyat, yang memakai ajaran agama Islam, yaitu:

Sekolah-sekolah Serikat Islam.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Sekolah Thowalib di Padang Panjang.

Sekolah-sekolah Nahdhatul Ulama.

Sekolah-sekolah Persatuan Umat Islam (PUI).

Sekolah-sekolah Persatuan islam (Persis).

Sekolah-sekolah Al-Jam'iyatul Washliyah.

Sekolah-sekolah Al-Irsyad.

Sekolah-sekolah Normal Islam.

Masih banyak sekolah-sekolah lain yang didirikan oleh para Ulama dan organisasi Islam di berbagai kawasan Indonesia, baik dalam bentuk Pondok Pesantren maupun madrasah.

Setelah Republik Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instansional Departemen Agama disertai tanggung jawab dan kewajiban terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama. Lembaga pendidikan agama ada yang berstatus negeri dan ada yang swasta. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai tindak lanjutnya adalah penyediaan dan pengadaan tenaga guru agama yang ditugaskan di Sekolah-sekolah umum negeri.

Untuk memenuhi kebutuhan guru agama Islam maka pada tahun 1950 Departemen Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Lulusan sekolah Guru Agama Islam dipersiapkan untuk menjadi guru agama di sekolah dasar. Sedangkan untuk guru agama di sekolah menengah, maka didirikan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHA). Untuk memenuhi tenaga guru di SGHA dan tenaga dosen agama Islam di perguruan tinggi umum, maka Departemen Agama mendirikan PTAIN yang kemudian bernama IAIN.

Pada tahun 1945 sampai tahun 1950 (masih menghadapi Revolusi Fisik) perhatian pemerintah dan rakyat lebih tertuju pada masalah-masalah politik dan bagaimana mempertahankan negara dari ancaman penjajah. Hal ini terlihat pada edaran dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pertama Ki Hajar Dewantara yang menitik beratkan kepada para kepala sekolah dan guru agar menanamkan sikap nasionalisme kepada para siswa²⁵.

Penentuan peraturan pendidikan agama tersebut adalah pengaruh para tokoh Ulama yang ada di Dewa Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1950. Jika dilihat dalam beberapa peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan agama sampai 1965, semuanya menyertakan syarat “mendapatkan izin dari orang tua atau wali siswa” atau “orang

²⁵ Ibid...p.352

tua atau wali siswa tidak meyakinkan keberatannya”. Barulah pada tahun 1966 setelah PKI dibubarkan, peraturan harus mendapat izin dari orang tua atau wali siswa untuk mengikuti pelajaran agama dapat dihapuskan dan pelajaran agama menjadi hak wajib bagi semua siswa dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh wilayah Indonesia.²⁶

Pendidikan agama khususnya Islam adalah peran aktif sekolah-sekolah swasta yang berlatar belakang Islam. Mereka dengan konsisten menjadikan pengajaran agama sebagai pelajaran wajib yang diajarkan kepada para siswa sejak kelas I SR (Sekolah Rakyat), meskipun pada waktu itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa pengajaran Republik Indonesia agama dimulai dari kelas IV SR (Sekolah Rakyat).

Dengan banyaknya sekolah-sekolah Islam swasta, baik sekolah umum, madrasah, ataupun pesantren, dunia pendidikan di Indonesia dapat terwarnai dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga Agama dapat menjadi penyeimbang terhadap sistem pendidikan nasional yang pada saat itu belum terlalu memperhatikan aspek pendidikan agama.

C. Peran Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Politik dan Pemerintahan

Sistem politik yang berkembang pada masa pemerintahan belanda pada tahun 1945 adalah sistem politik yang dipengaruhi

²⁶ Ahmad Mansur Surya Negara *API SEJARAH 2*. Ibid..p.xxxi

oleh nilai-nilai Islam sebagai sebuah keyakinan akan kebenaran yang hakiki dan pemberi legitimasi dalam perjuangannya.

Politik Belanda pada masa tahun 1945 selalu diwarnai oleh kecurigaan, kewaspadaan dan ketakutan terhadap segala sesuatu yang berbau Islam, sehingga melakukan kebijakan yang sangat membatasi ruang gerak umat Islam. Pendekatan yang baik ini mengalami perubahan ketika Snouk Hurgronje menjadi penasihat kerajaan Belanda dengan membuat rekomendasi sebagai dasar kebijakan pemerintah Hindia Belanda yakni melakukan stabilitas keamanan dan menarik hati rakyat Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah modern.

Melahirkan tokoh-tokoh Ulama yang memegang peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda muncul berbagai organisasi Islam yang sangat berpengaruh seperti Sarekat Islam (SI), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU).

Pemerintah Jepang mengizinkan pendirian organisasi gabungan dengan nama Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Masyumi dibentuk dalam Mukhtar Islam Indonesia di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal November 7 sampai dengan 8 November tahun 1945. Dalam Mukhtar tersebut diputuskan bahwa Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia. Ketua Majelis Syura adalah Hasyim Asy'ari dan salah seorang Wakil Ketuanya

adalah putranya, Wahid Hasyim, dengan pendukung utama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama²⁷.

Pada masa 1950-an Masyumi adalah salah satu dari empat partai besar yang ada di Indonesia pada saat itu, seperti yang telah saya singgung di atas bahwa Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi islam terbesar dan mempunyai banyak masa bila kita bandingkan dengan organisasi islam lainnya. Berdasarkan kenyataan ini dapat dibayangkan apabila salah satu dari dua organisasi besar ini mengundurkan diri dari Masyumi, maka partai ini akan kehilangan salah satu sayapnya (pesantren atau reformis) dari tubuhnya, dan memang kenyataan inilah yang terjadi pada awal 1950-an.²⁸

Partai Masyumi pecah antara lain disebabkan oleh pembagaian kekuasaan yang tidak seimbang didalam pemerintah. NU mengharapkan agar kursi menteri agama dapat ditunjuk dari golongan mereka. Namun Dewan Syura Masyumi memutuskan memilih KH. Fakhri Usman (berasal dari Muhammadiyah) untuk menduduki kursi Menteri Agama.²⁹ Kegagalan tersebut semakin memotifasi ulama tradisional untuk keluar dari partai ini dan mendirikan partai sendiri yang diberi nama NU. Dengan adanya perpecahan dua partai ini bukan hanya mengakibatkan perpecahan dari dua golongan ulama tersebut, tetapi juga

²⁷ Ricklefs *Sejarah Indonesia Modern..Ibid.* p.362

²⁸ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal 3

²⁹ Hasbi Indra, *Pesantren dan Transpormasi Sosial*” Jakarta: Penerbit Penamadani, 2005, hal 51

membuat umat islam yang ada di Indonesia saat itu menjadi terpecah belah. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa dalam hal politik ulama sudah mulai mementingkan kelompok masing-masing dan tidak melihat keadaan umat islam pada saat itu. Pada tahun 1960-an partai Masyumi dibekukan dan tinggal PNU sebagai satu-satunya partai Islam yang ada di Indonesia.

Keterlibatan ulama dalam politik praktis baik sebagai calon maupun sebagai pendukung calon Kepala Daerah, DPR, Presiden dan lain-lain menimbulkan kekhawatiran dari banyak kalangan, karena keterlibatan ulama dalam kancah politik praktis tersebut dikhawatirkan akan memecah belahkan umat islam. Ulama adalah orang yang menempati kedudukan tertinggi dimata umat, hal itu disebabkan karena kharismanya, ulama memiliki kelebihan dalam spiritual keagamaan serta kearifan, dan ulama juga memiliki beban membimbing, mengarahkan umatnya kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT. ulama juga merupakan tempat untuk bertanya dan konsultasi tentang kehidupan oleh semua umatnya.³⁰

Disamping itu Ulama dijadikan sebuah simbol pencitraan kepada masyarakat. Citra diri yang ingin dibentuk manakala calon tersebut menggandeng ulama adalah citra yang religius dengan komitmen mengangkat nilai-nilai religius Islam.³¹

³⁰ <http://muhammadidolaq.blogspot.com/2011/03/jika-kiai-jadi-politisi.html>, diakses tgl 29 April 2012

³¹ <http://edikusmayadi.blogspot.com/2012/03/ulama-dan-politik-lokal.html>, diakses tanggal 29 April 2011

Dengan peran tersebut membuat banyak perkataan ulama didengar oleh umat yang selalu setia mengikutinya. Namun kedudukan itulah membuat ulama menjadi rebutan banyak golongan, termasuk partai politik dan mereka melamar para ulama untuk menjadi wakil calon kepala daerah, calon anggota dewan dari partai mereka, dan mereka juga menggunakan ulama sebagai pendukung setia mereka karena perkataan ulama sangat dihargai oleh umat dan umat bisa memilih kandidat yang didukung oleh para ulama. Ketika ulama tergoda dengan politik praktis, maka ulama tidak lagi sebagai pengayom umat, dan pengaruh umat kejalan agama, tetapi ulama sudah berubah fungsi menjadi Makelar Politik/ Political Brokers.

Keterlibatan ulama dalam dunia perpolitikan Indonesia tidak banyak bisa merubah kebijakan pemerintah supaya bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik dan menjadikan pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat dan diridhai oleh Allah SWT. Hal itu disebabkan karena ulama tidak mampu bersaing dengan para politisi-politisi yang bukan berasal dari kaum ulama. Ulama belum mampu mengalahkan cara merasionalkan usulan-usulan kebijakan yang diajukan oleh para politisi-politisi kondang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang politik, akibatnya kebijakan-kebijakan yang sudah diskenariokan oleh para ulama tidak bisa dijalankan dalam dunia nyata. Dan bahkan sebaliknya politisi-politisi kondang tersebut mampu mempengaruhi ulama dan membuat ulama mengikuti

cara mereka berpolitik. Hal yang banyak terjadi dewasa ini meskipun relasi ulama dan politik bukan hal yang baru, namun yang perlu diperhatikan ialah jika calon yang didukung oleh para ulama menjadi penguasa daerah, namun para ulama jarang yang dimasukkan kedalam jajaran kabinetnya, sehingga kebijakan yang mereka jalankan tidak banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran ulama. Dalam perpolitikan Indonesia, aktifitas politik ulama sama saja dengan politisi-politisi yang bukan berasal dari partai yang bernuansa islam. Etika politik para politisi partai-partai politik islam tidak jauh berbeda dengan etika politisi yang tidak berasal dari partai islam. Contohnya para politisi partai-partai islam juga melakukan tindakan korupsi bahkan mereka juga melakukan tindakan yang sangat memalukan ketika sidang dilakukan dan hal itu menurut pengetahuan saya tidak pernah dilakukan oleh para politisi-politisi lainnya.

Ulama dalam menyampaikan dakwah dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah Pernah berkata dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi “ jihat yang paling utama adalah (melontarkan kalimat yang adil dihadapan penguasa yang dhalim”.³² Ulama seharusnya berada di barisan terdepan dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara kaum muslim secara umum, dan memberi perhatian terhadap keadaan kaum muslimin, terutama perlakuan pemerintah atau

³² Saifullah dkk, *Islam, Dakwah dan Politik*, Bogor: Perpustakaan Nasional, 2002, hal 9

penguasa terhadap mereka.³³ Ulama harus terlibat langsung dalam mengontrol, menjaga, memberikan kritik dan nasihat agar penguasa bisa memimpin bangsa ini dengan berlandaskan Al-quran dan hadits. Ulama juga tempat penguasa bertanya dalam ragam kebijakan menyangkut urusan pemerintahan, politik, sosial ekonomi, pendidikan, dll.

Karena itu, peran politik ulama adalah sebuah keniscayaan. Politik adalah pengaturan rakyat yang tidak akan pernah berpisah dengan visi dan misi sosok ulama. Rusaknya moral para birokrat, bergesernya haluan politik pada sekadar hanya untuk meraih kekuasaan, “lugu”-nya masyarakat menilai persoalan politik, dan intervensi asing terhadap negara, boleh jadi di antaranya karena peran politik ulama yang kian terpinggirkan.³⁴ Peran politik ulama setidaknya adalah dalam beberapa aktivitas berikut:

- a. Menjaga kejernihan pemikiran masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.
- b. Membangun kesadaran politik masyarakat bahwa masyarakat harus mengetahui perkembangan perpolitikan di negaranya, sehingga apabila pemerintah melakukan kebijakan yang tidak sesuai, maka masyarakat bisa secepatnya mengatasi hal tersebut.

³³ Ibid, hal 12

³⁴ <http://hizbut-tahrir.or.id/2007/04/01/politik-ulama/> diakses tanggal 28 April 2012

- c. Melakukan perang pemikiran (ash- shirâ,, al -fikri) apabila kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah itu jauh dari harapan semua umat dan bertentangan dengan agama.
- d. Melakukan kontrol terhadap penguasa (muhâsabah li al-hukkâm) supaya penguasa senantiasa melakukan/ menjalankan kebijakan yang semestinya.
- e. Membongkar konspirasi penjajah.
- f. Memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat baik itu dalam hal kehidupan beragama, maupun dalam kehidupan berkelompok.
- g. Menggerakkan masyarakat untuk berjihad dan melakukan perubahan masyarakat. Baik itu dalam hal kebijakan pemerintah, maupun dalam hal cinta agama dan tanah air.

Para politisi sipil yang mendominasi Indonesia pada masa itu sebagian besar masih berasal dari kelas ulama-ulama Indonesia dan para priyayi. kelompok yang mengambil pimpinan di dalam gerakan nasional di Indonesia. ulama-ulama dan priyai adalah kaum terpelajar dengan latar belakang aktivisme politik dan tugas pemerintah.

Pada tahun 1950 para politis Jakarta membentuk suatu sistem parlementer Kabinet bertanggung jawab kepada suatu parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) yang jumlah anggotanya 232 yang dianggap sebagai kekuatan politik dan kekuasaan

pemerintahan di Indonesia yang menjadi, terbagi beberapa suara dan kursi dipemerintahan Indonesia di antaranya adalah. Masyumi Mendapat 49 kursi (21 persen), PNI 36 Kursi (16 persen), PSI 17 Kursi (7,3 persen), PKI 13 Kursi (5,6 Persen), Partai Katholik 9 Kursi(3,9 Persen) partai keristen 5 Kursi (2,2 Persen)ndan Murba 4 Kursi (1,7 Persen) ,sedangkan lebih dari 42 persen kursi dibagi diantara partai partai atau perorangan-perorangan lainnya. Hal ini merupakan suatu struktur partai yang tidak menopang pemerintahan-pemerintahan yang kuat tetapi umumnya diyakini bawhanya struktur kepartaian tersebut akan disederhanakan apabila pemilahan umum dilaksanakan³⁵.

D. Peran Ulama Pada Masa Orde Lama dalam Bidang Sosial dan Ekonomi

Ulama dan Santri memasuki tahun 1944 menghadapi tantangan yang sangat berat Balatentara Jepang mencoba menggenggam seluruh wilayah Asia Timur Termasuk Indonesia.

Perang membutuhkan pangan atau beras sera logistik lainnya, ulama desa diwajibkan menyerahkan bahan makanan pada pemerintahan Jepang. Perang membutuhkan dana untuk pembangunan kembali mesin perang yang rusak. umat islam diwajibkan menyerahkan harta emas intannya dan rakyat dijadikan obyek kerja paksa oleh pemerintah Jepang.

³⁵ Ibid..P.363

Perang Asia Timur Raya dan Perang Dunia II berdampak masalah sandang pangan menjadi langka, keluarga Tentara pembela Tanah Air PETA yang dipimpin oleh Ulama tidak dapat menghindari dari bencana kelaparan dan kekurangan sandang, Dalam kondisi ini, gerakan protes sosial dari desa-desa yang dipimpin oleh ulama Desa di Jawa dan pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). bekerja sama dengan Ulama tentang pemerintahan jepang yang terjadi ³⁶.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1968. Indonesia bergantian menggunakan system ekonomi liberal dan system ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah :

1. Situasi politik yang diwarnai maneuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan (masyumi, PSI, dan tentara-AD) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional.
2. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh banggunya cabinet tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut.

³⁶ Ibid,...p.86

3. Yang paling pokok: borjuasi dalam negeri (pribumi) yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh³⁷.

Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti.

- Berdikari di bidang ekonomi;
- Berdaulat di bidang politik dan
- Berkepribadian dalam budaya

Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap luar negeri.

³⁷<http://muhammadidolaq.blogspot.com/2011/03/jika-kiai-jadi-politisi.html>, diakses tgl 29 April 2012

³⁷<http://edikusmayadi.blogspot.com/2012/03/ulama-dan-politik-lokal.html>, diakses tanggal 29 April 201

Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak eksklusif untuk mencetak uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan keputusan politik.

Sejak tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.

Rencana ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan atau memburuk.

Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana

revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.

Perekonomian juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan negara-negara komunis.

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh:

1. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

2. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3. Kas negara kosong.
4. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

- a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
- b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

- e. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 untuk mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
- f. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

Masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1957 Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan *laissez faire laissez passer*. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.

Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak

pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

Masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1967 Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).

- Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
- Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa itu:

- a. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut: Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara

terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.

- c. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
- d. Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
- e. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.